



**MEKANISME PERMOHONAN PEMBEBASAN DENDA ATAS  
TUNGGAHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RODA  
DUA DI SAMSAT KOTA TEGAL**

**TUGAS AKHIR**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli  
Madya Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal**

**Oleh :**

**NURBAETI**

**4218300005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

---

Saya Nur Baeti yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawabannya sepenuhnya berada pada saya.

---

Tegal, 2021

Yang menyatakan



**Nur Baeti**

NPM. 4218300005

## HALAMAN PERSETUJUAN

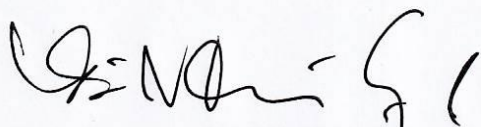
Nama : Nur Baeti  
NPM : 4218300005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program studi : Manajemen Perpajakan  
Judul : MEKANISME PERMOHONAN PEMBEBASAN DENDA  
ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(PKB) RODA DUA DI SAMSAT KOTA TEGAL

Tegal, 2021

Mengetahui :

Dekan

Pembimbing



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M.Akt, CA

NIPY. 136628111975



Jaka Waskito, SE., M.Si.

NIPY. 86524101967



## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Pada hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2021

Penguji I,



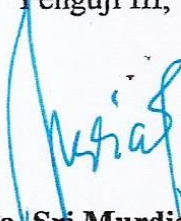
**Jaka Waskito, S.E., M.Si.**  
**NIDN. 0624106701**

Penguji II,



**Amirah, S.E.I., M.Sc**  
**NIDN. 0629118402**

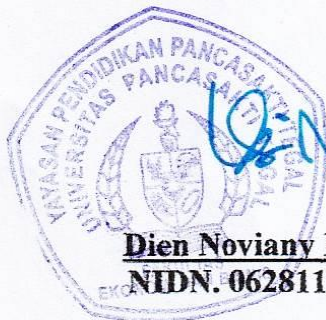
Penguji III,



**Dra. Sri Murdiati, M.Si.**  
**NIDN. 0609096501**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



**Dien Noviany R, S.E., M.M. Ak., CA**  
**NIDN. 0628117502**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT. yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, maka selesailah sudah penyusunan tugas akhir ini. Tugas akhir ini dibuat sebagai syarat untuk membuat Tugas Akhir di Program Diploma 3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Dengan rasa berhutang budi yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M.Ak.,CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Ibu Mei Rani Amalia, SE., M.M. Selaku Kepala program Studi Manajemen Perpajakan
3. Bapak Jaka Waskito, SE., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir
4. Semua pihak yang telah membantu dan tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan membimbing agar saya dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini masih banyak kelemahannya dan kekurangannya. Karena itu kritik, saran dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan Tugas Akhir ini.

Tegal, 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baeti', with a stylized flourish underneath.

Nur Baeti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
D. Metode Pengumpulan Data.....	5
BAB II. GAMBARAN UMUM INSTANSI / PERUSAHAAN .....	6
A. Sejarah SAMSAT Kota Tegal .....	6
B. Visi dan Misi SAMSAT Kota Tegal .....	10
C. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Tegal .....	11
D. Kepegawaian .....	12

BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....	15
A. Tinjauan Teori .....	15
B. Praktek .....	44
BAB IV. PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	57



## **DAFTAR TABEL**

### **Tabel**

3.1 Persentase Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	23
3.2 Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor .....	47
3.3 Contoh Perhitungan Pembebasan Denda PKB .....	48
3.4 Contoh Perhitungan Pembebasan Denda PKB .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar**

2.1 Struktur Organisasi SAMSAT Kota Tegal .....	11
3.1 Perhitungan Pajak Kendaraan .....	37
3.2 File yang dilampirkan dalam Perpanjangan pajak .....	39
3.3 File yang dilampirkan dalam Perpanjangan pajak .....	40
3.4 Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....	42
3.5 Pelaksanaan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Surat pembebasan denda PKB .....	58
2. Surat pembebasan denda PKB .....	59
3. Surat tagihan PKB .....	60
4. NJKB Tahun 2019 Jenis Sepeda Motor Roda Dua .....	61
5. NJKB Tahun 2019 Jenis Sepeda Motor Roda Dua .....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang Indonesia di masa kini masih terus-menerus merealisasikan pengembangan diberbagai aspek, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa yang adil dan sejahtera, dan dalam melaksanakannya setiap negara harus memperhatikan masalah tentang pembiayaan, yakni melalui cara mengoptimalkan kapasitas perolehan yang berasal dari Negara Indonesia itu sendiri, dan salah satunya yaitu berasal dari pajak.

Pajak merupakan iuran wajib untuk mendukung pemerintah Negara, diperlukan dalam bentuk uang ataupun barang dan ditegakkan oleh hukum, tetapi tidak ada kompensasi langsung, dan bisa merasakannya dalam jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak terutama pajak provinsi mencakup 5 jenis pajak provinsi, diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak daerah menyumbangkan porsi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, dan salah satunya yakni pemungutan pajak daerah yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).



Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Pajak tersebut dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan yang mempunyai dan/atau mengoperasikan kendaraan bermotor. satu hal penting yang harus diperhatikan yaitu bahwa perhitungan Dasar Perhitungan Pajak (DPP) yang setiap kali berubah-ubah di setiap tahunnya. Perubahan atas DPP yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Konsekuensi dari nilai yang berfluktuasi ini menyebabkan ketidakpastian tentang jumlah pajak yang terutang Wajib Pajak.

Pembebasan Sanksi Administrasi keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bertujuan demi mengatasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah yang sudah mencapai Rp.450 Milliar. Kebijakan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan BBNKB II dan pembebasan sanksi PKB di dalam dan diluar Jawa Tengah.

Saat ini karena rendahnya kontribusi masyarakat terhadap pembayaran PKB, dan pemungutan pajak kendaraan belum optimal. dan karena kurang aktifnya pihak yang bertanggung jawab atas penagihan, serta ketidakpedulian masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Mengingat masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor yang terus-menerus meningkat disetiap tahunnya, dan pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terlambat dan tidak membayarkan pajak

terutang, sehingga pemerintah harus melakukan langkah yang akan diambil yaitu dengan penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penagihan tunggakan pajak adalah cara mendapatkan sarana pencairan atas tunggakan pajak, antara lain surat peringatan, pemberitahuan surat paksa, pemberlakuan sita, penyanderaan, dan/atau penjualan barang sitaan berdasarkan ketetapan yang telah dibuat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang sudah diganti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu agar Wajib Pajak dapat membayar utang Pajak Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan biaya denda keterlambatan, mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan mematuhi tindakan *discipline* terhadap pengendara. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu rangkaian kegiatan yang mengintegrasikan identifikasi dan registrasi kendaraan, pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLL dan biaya perjalanan kendaraan yang dikoordinasikan dalam kantor bersama SAMSAT.

Berdasarkan uraian di atas, alasan memilih judul untuk mengetahui, tata cara pemberian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor, maka penulis

tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Permohonan Pembebasan Denda atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua di SAMSAT Kota Tegal”.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemberian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

1. Tujuan dari penulisan

Tujuan dari penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui tata cara pemberian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor
- b. Untuk mengetahui timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Untuk memperluas pandangan dan meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme permohonan pembebasan denda atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua di SAMSAT Kota Tegal.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Untuk menambah dan memperbanyak isi bacaan di perpustakaan sehingga mahasiswa dapat menggunakannya untuk mempelajari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta berguna dan bermanfaat bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal.

c. Bagi SAMSAT Kota Tegal

Sebagai bahan masukan atau acuan sumber bacaan dan semoga dapat memotivasi pegawai SAMSAT untuk meningkatkan manfaat Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek ini yaitu :

1. Metode Interview

Pencarian data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan, dan menanggapi secara kepada pihak yang bersangkutan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

2. Metode Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang menjadi bahan penulisan.

3. Metode Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat atau mengambil objek dari buku.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI / PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah UPPD SAMSAT Kota Tegal**

Berawal diterbitkannya kebijaksanaan desentralisasi yaitu landasan normatif pada pergantian penyelenggaraan pemerintahan dalam daerah, meliputi perubahan wewenang baik di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, ataupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pergantian wewenang ini akan mempengaruhi atas pergantian tanggung jawab serta struktur organisasi yang menjalankan wewenang-wewenang tersebut yang atas gilirnya menuntut telah dilakukan penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah yaitu konsekuensi logis atas pergantian mendasar dalam sistem Pemerintahan Daerah sebagai halnya di gariskan dalam ketentuan desentralisasi.

Dalam rangka pengembangan kelembagaan organisasi pemerintah daerah, dasar penataan kelembagaan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang jumlah dinas, badan, kelembagaan dan sub- sub struktur yang menjadi bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Kelayakan untuk menentukan apakah suatu entitas hanya perlu dipertahankan, diubah atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Secara yuridis formal, urutan kelembagaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kebijakan ini memiliki konsekuensi logis bagi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kota, tidak lagi bersifat hierarkis, dan setiap pemerintah daerah ditempatkan sebagai self-governing state. Demikian pula pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan antara pemerintah negara bagian dengan bupati/daerah banyak mengalami perubahan dan perubahan. Inti dari peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang penyelenggaraan organisasi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) tentang Pemerintahan Antara Pemerintah Negara Bagian dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata cara penyelenggaraan perangkat daerah dalam kaitannya dengan penunjukan teknis.

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jawa Tengah pada awalnya disebut DPPAD yang memiliki misi menghimpun, memungut, dan mengelola pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jawa tengah.

Pendirian DIPENDA diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1967, berdasarkan letak dan susunan organisasi, dan jumlah KUPD/A.36/I/15 hanya ada dalam DIPENDA agung. Waktu ditempatkan di bawah kewenangan sekretariat daerah.

Pembentukan DIPENDA diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1967, berdasarkan letak dan susunan organisasi, dan jumlah KUPD/A.36/I/15 hanya ada dalam DIPENDA agung. Waktu ditempatkan di bawah kewenangan sekretariat daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri di bidang pendapatan daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang pembentukan dan Susunan organisasi Daerah Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPPD Provinsi Jawa Tengah mempunyai 37 (tiga puluh tujuh) unit pelayanan teknis di daerah yang disebut dengan Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

UPPD Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di Jawa Tengah. Setiap UPPD dipimpin oleh seorang petugas dari UPPD yang berada dibawah yang bertanggung jawab pada Kepala Badan.

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) meliputi :

1. Kepala Unit

Unit Pelaksana sebagai Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang dipimpin seorang Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

4. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Setiap seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

5. Unit Pelaksana

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pembantu (UPPD Pembantu) adalah sebuah unit pelaksana dibawah unit pelaksana pendapatan daerah yang dipimpin seorang Kepala Unit Setingkat Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Pendapatan Daerah.



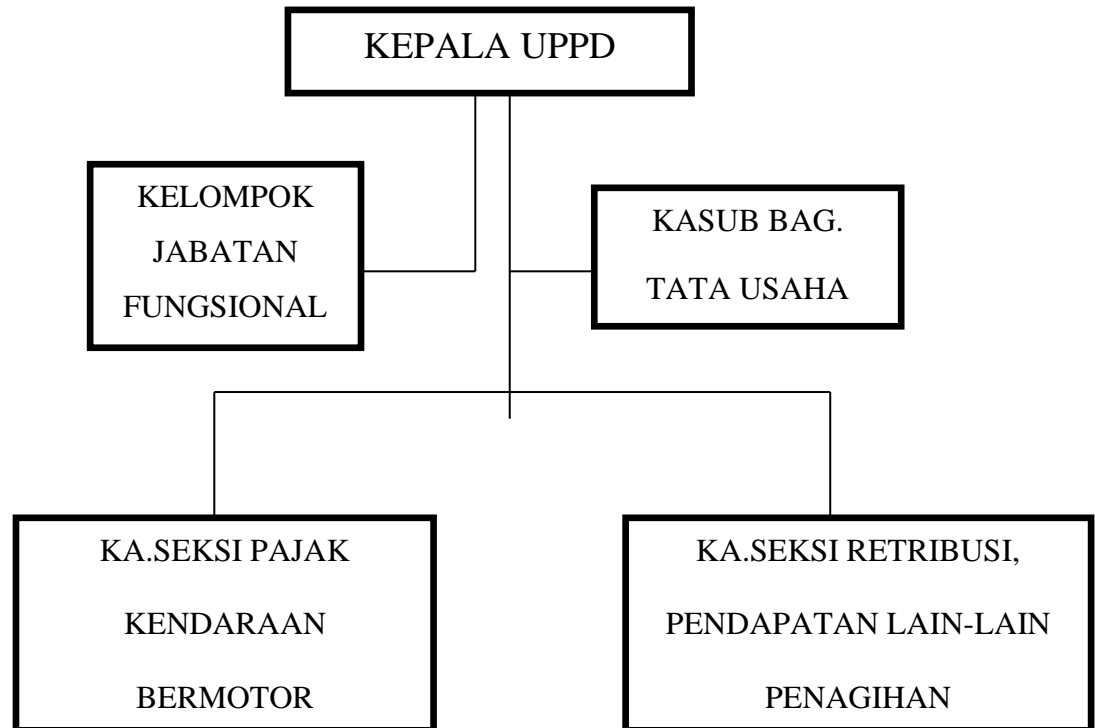
**B. Visi dan Misi SAMSAT Kota Tegal****1. Visi SAMSAT Kota Tegal**

Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi untuk pemerintahan yang bersih

**2. Misi SAMSAT Kota Tegal**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan
- c. Mengembangkan implementasi teknologi informasi
- d. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur
- e. Meningkatkan budaya aparatur pelayanan public
- f. Mengintensifikan pemungutan pajak daerah
- g. Mengintensifikan dan mengekstensifikan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain

### C. Struktur Organisasi



*Sumber : SAMSAT Kota Tegal*

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi SAMSAT Kota Tegal 2021**

Bagan-bagan struktur organisasi

1. Kepala UPPD : Mujiyono, SH, MH
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Hery Berthus, S.A, S.SE
3. Kepala Seksi PKB : Muchamad Safii, SH
4. Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan Lain-lain, Penagihan : RM, Andi Mulyono K, SE.,M.Si
5. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor SAMSAT Kota Tegal**

Berikut penjelasan dari setiap bagian struktur organisasi yang telah digambarkan sebelumnya.

1. Kepala UPPD
2. Ka. Sub. Bag. TU
  - a. Sub bagian pengelolaan ketatausahaan
  - b. Sub bagian koordinasi dan penyusunan
  - c. Sub bagian program dan kegiatan
  - d. Sub bagian pengelolaan keuangan unit
  - e. Sub bagian pengelolaan pegawai
  - f. Sub bagian pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah
  - g. Sub bagian kerjasama dan kehumasan
  - h. Sub bagian pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
  - i. Sub bagian koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan
  - j. Sub bagian merencanakan anggaran belanja kantor tahun berjalan dan mendatang baik secara manual maupun melalui aplikasi E-project planning
  - k. Sub bagian mengontrol pengeluaran belanja kantor melalui aplikasi E-controlling
  - l. Sub bagian mengontrol kehadiran pegawai melalui aplikasi E-presensi, melakukan kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin

### 3. Kasi Retribusi Pendapatan Lain-lain dan Penagihan

- a. Sub bagian mempersiapkan susunan rencana teknis oprasional di bidang RPP
- b. Sub bagian mengkoordinasikan pelaksana teknis oprasional di bidang RPP
- c. Sub bagian pelaksanaan pemungutan retribusi
- d. Sub bagian pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak roko.
- e. Sub bagian pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain,yaitu bagi hasil pajak daerah
- f. Sub bagian pelaksanaan penagihan pajak RPP
- g. Sub bagian evaluasi dan pelaporan di bidang RPP

### 4. Kasi Pajak dan BBNKB

- a. Sub bagian menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang PKB
- b. Sub bagian melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis operasional dibidang PKB
- c. Sub bagian melaksanakan rencana program kegiatan PKB dan BBNKB meliputi pendataan pelaporan dan keberatan PKB dan BBNKB
- d. Sub bagian melaksanakan sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dibidang PKB dan BBNKB

- e. Sub bagian melaksanakan pelayanan konsultasi administrasi dan teknis bidang PKB dan BBNKB
- f. Sub bagian melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang PKB

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Definisi Pajak**

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.. (Mardiasmo, 2018:3)

##### **a. Fungsi Pajak**

Ada 2 fungsi pajak yakni sebagai berikut :

##### **1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintah untuk menutupi pengeluarannya.

##### **2) Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

Contohnya :

- a) Minuman keras dikenai pajak yang tinggi dikarenakan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Barang-barang yang mewah dikenai pajak yang tinggi dikarenakan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

b. Syarat pemungutan pajak

supaya pemungutan pajak tidak menyebabkan hambatan ataupun perlawanan, jadi pemungutan pajak wajib melengkapi persyaratan meliputi:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, penerapan hukum dan pemungutan pajak harus adil. Keadilan hukum mencakup sistem perpajakan yang umum dan adil yang disesuaikan dengan setiap kemungkinan. Ini benar-benar adil. Artinya, memberikan hak kepada wajib pajak untuk menggugat, menunda pembayaran, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

perpajakan diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi keadilan baik bagi negara ataupun warga negaranya.

### 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu produksi atau kegiatan komersial, agar tidak menyebabkan stagnasi keuangan warga Negara.

### 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Dalam fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya

### 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Memudahkan serta mendorong warga sekitar agar menjalankan tanggung jawab atas perpajakannya. Persyaratan ini di penuhi dengan perundang-undangan yang baru.

Contohnya :

- a) Bea meterai telah disederhanakan dari 167 tarif menjadi 2 tarif.
- b) Pajak pertambahan nilai bervariasi menjadi tarif pajak tunggal yakni 10%.
- c) Pajak perseroana badan dan pribadi suatu badan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh), yang berlaku baik untuk badan ataupun orang pribadi.

## c. Pengelompokan Pajak

### 1) Menurut golongannya

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang ditanggung bagi wajib pajak dan tidak bisa dipungut ataupun didelegasikan pada pihak lain.



Contohnya : PPh

- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya bisa ditagih ataupun didelegasikan pada pihak lain.

Contohnya : PPN

## 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan status Wajib Pajaknya. timbulnya pajak tergantung pada subjeknya.

Contohnya : PPh

- b) Pajak Objektif adalah pajak yang tanpa memperhatikan status wajib pajakannya, timbulnya pajak tergantung pada objeknya.

Contohnya : PPN dan PPNBM

## 3) Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak pusat adalah Pajak yang dikenakan bagi Pemerintahan Pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : PPh , PPN, PPNBM, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan bagi Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). dan Pajak Kabupaten/Kota, seperti: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Tata cara pemungutan pajak

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak bisa dilakukan dengan tiga stelsel :

a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Tahun pajak berakhir, yaitu setelah pendapatan sebenarnya diketahui. Stelsel ini memiliki kelebihan atau kekurangan. Keuntungan dari sistemnya yakni pajak dipungut lebih realistis. Sementara itu kerugiannya yakni pajak baru bisa dipungut diakhir periode (setelah pendapatan sebenarnya diketahui)

b) Stelsel anggaran (*fictieve stelsel*)

pajak dikenai dan di dasarkan dalam asumsi-asumsi yang telah ditetapkan Undang-Undang. contohnya, pertimbangkan pendapatan tersebut sama dengan pendapatan tahun sebelumnya maka jumlah kena pajak untuk tahun pajak saat ini dapat ditentukan pada awal tahun pajak. Kelebihan dari stelsel ini yaitu bisa saja membayar pajak sepanjang tahun tanpa menunggu sampai akhir tahun, namun kelemahannya yaitu tidak bisa membayar pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel yakni gabungan dari stelsel nyata serta anggapan. Untuk awal tahun, pajak dihitung bersumber pada asumsi, dan untuk akhir tahun, disesuaikan pada keadaan sebenarnya. Bila

mana jumlah yang sebenarnya lebih tinggi dari jumlah pajak hipotetis, wajib pajak harus menambahkannya. Di sisi lain, jika kelebihannya kecil, bisa dimintai kembali.

e. Asas pemungutan pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak memungut pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, Pendapatan nasional dan luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak untuk mengenakan pajak pada pendapatan yang dihasilkan di wilayahnya, terlepas dari tempat tinggal wajib pajaknya.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak terkait dengan kebangsaan suatu negara.

f. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pemerintahan (fiskus) agar menentukan jumlah pajak yang harus dibayar bagi wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang buat menentukan jumlah pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak pasif.

- c) Setelah otoritas pajak menerbitkan SPT, akan timbul pajak yang belum dibayar.

## 2) *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk memutuskan sendiri berapa pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya :

- a) Wajib Pajak berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- b) Wajib Pajak berinisiatif memulai dengan menghitung, melaporkan dan mengajukan sendiri pembayaran pajaknya.
- c) Fiskus tidak ikut campur tetapi sekedar mengawasannya

## 3) *Withholding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga (tidak ada otoritas pajak atau wajib pajak yang terlibat) buat memotong atau memungut pajak yang terutang bagi Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : hak untuk memotong atau memungut pajak yang belum dibayar ada pada pihak ke-3, yaitu pihak tersebut bukan fiskus atau wajib pajak.

## g. Hambatan Pemungutan pajak

Hambatan untuk pemungutan pajak bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yakni sebagai berikut :

### 1) Perlawanan pasif

Masyarakat menolak (pasif) membayarkan pajaknya, yang bisa disebabkan karena :

- a) Perkembangan *intellectual* serta moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan (mungkin) membingungkan masyarakat.
- c) Sistem pengendalian tidak bisa diimplementasikan atau dengan baik.

### 2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif yakni serangkaian upaya dan tindakan yang dilaksanakan wajib pajak untuk menghindari pajak.

Bentuknya yakni sebagai berikut :

#### a) *Tax avoidance*

Adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dan tidak melanggar hukum.

#### b) *Tax evasion*

Adalah upaya untuk mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh pelanggaran hukum (menggelapkan pajak).

### h. Tarif pajak

Ada empat macam tarif pajak yakni sebagai berikut :

#### 1) Tarif sebanding/*proporsional*

Tarif pajak adalah persentase tetap terlepas dari jumlah kena pajak, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan sebanding dengan jumlah kena pajak.

Contohnya : bagi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di daerah pabean akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

## 2) Tarif tetap

Tarif pajak memiliki jumlah yang sama atas berapapun jumlah yang dikenakan pajak maka besarnya pajak yang harus dibayar tetap.

Contohnya : jumlah tarif bea materai pada cek serta bilyet giro nilai nominal berapapun yakni sebesar Rp 3.000.000.

## 3) Tarif progresif

persentase pajak yang digunakan semakin tinggi bila jumlah yang dikenakan pajak semakin tinggi.

Contohnya : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

**Tabel 3.1 Persentase dari Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

*Sumber : Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*

Tarif progresif dibagi menjadi 3 yakni, sesuai dengan persentase kenaikan tarif meliputi :

- a) Tarif progresif progresif yaitu persentase akan meningkat secara bertahap.
  - b) Tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentase tetap.
  - c) Tarif progresif regresif yaitu persentase akan menurun secara bertahap.
- 4) Tarif regresif

Semakin rendah persentase pajak yang digunakan apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar pula.

## **2. Pengertian Pajak Daerah**

Beberapa definisi atau istilah yang berkaitan dengan pajak daerah adalah:

- a. Daerah Otonom disebut dengan daerah, merupakan kesatuan hukum dan sosial dengan batasan-batasan wilayahnya yang mempunyai kewenangan yakni mengarahkan serta mengendalikan operasi pemerintah dan kepentingan umum atas inisiatif mereka sendiri hal ini didasarkan pada keinginan rakyat dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah disebut dengan pajak, merupakan partisipasi wajib pajak pada daerah yang terutang untuk orang pribadi ataupun organisasi Dibatasi oleh hukum dan sifatnya memaksa tanpa

menerima kompensasi langsung yang digunakan bagi kebutuhan daerahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

- c. Badan merupakan sekelompok orang dan/atau modal yang membentuk suatu kesatuan, baik yang melaksanakan usaha ataupun tidak seperti perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, ataupun Badan BUMD.
- d. Subjek Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang dikenai pajak.
- e. Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan, seperti yang membayar, memotong, serta memungut pajak, dan memiliki hak serta kewajiban perpajakannya dengan mematuhi peraturan setempat dan persyaratan pajak.

### **1) Fungsi Pajak Daerah**

Berperan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintah, baik dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dengan fungsi mengatur/*regulatory*, penerimaan/*budgetary*, redistribusi/*redistributive*, serta alokasi sumber daya/*resource allocation* ataupun kombinasi diantara keempatnya. Secara umum fungsi pajak daerah yang pada gilirannya diarahkan bagi alokasi sumber daya untuk rangka pemberian pelayanan pada masyarakat, disamping itu selain fungsi peraturan untuk mengontrol. Oleh karena itu, fungsi pajak daerah bisa dibagi



menjadi dua fungsi utama, yakni fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Tetapi perbedaannya tidak sejajar.

a) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Salah satu fungsi pajak daerah yang terpenting yakni mengisi sumber keuangan daerah. Dan fungsi penerimaan disebut fungsi anggaran dan dapat dengan mudah dipahami sebagai alat bagi pemerintahan daerah bertujuan memobilisasi dana publik guna kepentingan publik.

b) Fungsi Pengaturan (*regulerend*)

Yakni regulasi atau standarsasi, hal ini pajak daerah bisa dijadikan sebagai alat bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Dan bisa dipungut untuk mempengaruhi tingkat konsumsi barang ataupun jasa. Pajak daerah mencerminkan peningkatan penghasilan daerah, apalagi pada era otonomi daerah tugas pemerintahan dan pembangunan daerah membutuhkan dana yang tinggi, dan sumber dana tersedia sangat terbatas, mendorong daerah guna menciptakan sumber daya dengan kreatif dan dapat mendukung penghasilan daerah. pembiayaan belanja daerah. Fungsi pengaturan bisa dicapai dengan cara dikenai pajak daerah yang tinggi pada aktivitas masyarakat yang kurang diperlukan. Di sisi lain, pengembangan aktivitas prioritas berdampak positif untuk perekonomian masyarakat dikenai

pajak yang rendah. Fungsi pengawasan belum banyak digunakan di semua daerah. Beberapa daerah menerapkan tarif yang berbeda antara gabungan masyarakat yang berbeda-beda, dan fungsi perpajakan serta regulasi dihitung dalam perumusan kebijakan tersebut. Kebijakan ini bisa membantu gabungan masyarakat tertentu didalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Hal yang jarang diperhatikan banyak daerah yakni memberikan insentif pajak daerah untuk menarik investasi di daerah.

## 2) Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah harus mengikuti serangkaian prinsip umum tertentu agar pemungutannya bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Beberapa prinsip yang biasa digunakan dalam bidang perpajakan, Berikut adalah beberapa prinsip dasar perpajakan yang baik, yakni sebagai berikut:

### a) Prinsip keadilan (*equity*)

Menekankan pentingnya menyeimbangkan kapasitas setiap wajib pajak daerahnya. Menyamakan kapasitas wajib pajak berarti tidak ada diskriminasi antar wajib pajak dalam pemungutan pajak yang memiliki kapasitas yang sama. Semua pemungutan pajak kena pajak harus sesuai batas kemampuan masing-masing subjek. Oleh

karena itu, menurut prinsip kesetaraan ini, masyarakat dengan kapasitas yang berbeda akan memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya.

b) Prinsip Kepastian (*certainty*)

Menekankan pentingnya kepastian, baik bagi pemungut ataupun wajib pajak. Kepastian pajak daerah mencakup dasar hukum yang mengaturnya. Kepastian tentang subjek pajak, objek, tarif dan juga dasar pengenaan pajak, serta tata cara pemungutannya. Adanya kepastian memastikan tidak ada yang ragu-ragu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, karena semuanya sudah diatur dengan jelas.

c) Prinsip Kemudahan (*convenience*)

Menekankan pentingnya wajib pajak daerah tepat waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Pemungutan pajak harus dilakukan saat wajib pajak daerah memperoleh penghasilannya. jika masyarakat tidak mampu membayar pajak daerah, negara tidak akan dapat memungut pajak daerah. Bahkan di dalam daerah seharusnya perlu menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan.

d) Prinsip Efisiensi (*efficiency*)

Prinsip ini menekankan pentingnya pemungutan pajak yang efisien, maksudnya yakni biaya yang timbul

akibat pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak yang dipungut. Prinsip ini mencakup konsep bahwa pemungutan pajak daerah harus memperhatikan mekanisme yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah.

Untuk menjaga prinsip tersebut, pajak daerah harus memiliki karakteristik tertentu. Adapun karakteristiknya, terutama yang dihadapi di banyak negara berkembang, adalah sebagai berikut: Pajak daerah dapat dipungut secara ekonomis. Artinya, tarif pemungutan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya, Stabilitas relatif berarti bahwa penerimaan pajak sedikit berfluktuasi dan dapat meningkat atau menurun secara signifikan. Basis pajak harus merupakan kombinasi dari prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

### **3) Wewenang Pemungutan Pajak Daerah**

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian berkenaan dengan kewenangan memungut pajak atas objek pajak daerah. Secara spesifik, berikut ini : Pajak daerah dipungut oleh negara dan pajak daerah dipungut oleh kabupaten/kota.

Perbedaan kewenangan memungut pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah yakni meliputi:

- a. Pajak provinsi pemungut pajak adalah milik pemerintahan daerah provinsi, dan dalam hal pajak kabupaten/kota adalah milik pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Pajak kabupaten/kota lebih luas dari objek pajak provinsi dan objek pajak kabupaten dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah asalkan konsisten dengan peraturan yang ada. Di sisi lain, bila menginginkan memperluas cakupan pajak daerah, harus menyetujui pergantian pada Undang-Undang tersebut.

Pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan yang dikenakan yakni kendaraan beroda dan gandengannya, operasi kendaraan yang dilaksanakan di darat dan air. Kendaraan yang beroperasi di atas air, total ton adalah GT5 hingga GT7.

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sama halnya membayar PKB, BBNKB juga dilakukan di Kantor SAMSAT. Dalam hal perpindahan kepemilikan kendaraan wajib dibayar biaya pengalihan kepemilikan kendaraan. Dokumen yang diserahkan harus disertai dengan laporan tertulis yang disampaikan pada gubernur ataupun pejabat yang berwenang paling

lambat 30 hari. Untuk barang batch pertama, tarif pembebanan transfer BBNKB adalah 20%. pengiriman berikutnya yakni 1%.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB akan memungut PBBKB. Bahan bakar yang dimaksud berupa cairan atau gas. Tarif yang dikenakan yakni 10%.

d) Pajak Air Permukaan

Dikenakan untuk orang pribadi dan badan yang menggunakan pajak tersebut. Kecuali penggunaan air oleh penduduk untuk kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi persawahan dan perikanan. Penggunaan pajak tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungannya. Dan tarifnya maksimal yaitu 10%.

e) Pajak Rokok

diterapkan bersamaan dengan pajak konsumsi tembakau. Pasalnya, rokok adalah salah satu dari tiga komoditas kena pajak di Indonesia. dikenakan tarif yakni 10%.

Sedangkan pajak kabupaten atau kota, terdiri atas :

a) Pajak Hotel

Didefinisikan sebagai perusahaan yang menyediakan akomodasi ataupun layanan liburan berbayar. Pajak

Hotel juga dikenai untuk motel, losmen, shelter wisata, wisma, serta rumah kos dengan 10 kamar atau lebih.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran ditujukan untuk menjual makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh konsumen, dan tarifnya maksimum yang dipungut yaitu 10%, baik konsumsi tersebut dilakukan di sana maupun di tempat lain.

c) Pajak Hiburan

Yaitu kelompok yang menyelenggarakan kegiatan hiburan, termasuk tingkat individu ataupun perusahaan. Kegiatan hiburan yang memenuhi syarat termasuk menonton film, pertunjukan, diskotik, dan kompetisi golf. Tarifnya tertinggi yakni 75% Untuk hiburan berupa kesenian rakyat yang harus dilestarikan, dan tarif terendah yakni 10%.

d) Pajak Reklame

yaitu suatu benda, instrumen, tindakan, ataupun kendaraan yang sengaja dirancang untuk tujuan commercial untuk mengiklankan suatu produk, jasa, atau entitas. Reklame bisa dalam bentuk papan, kanvas, pamflet, tempelan dll.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak tersebut di pungut untuk penggunaan energi listrik.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak termasuk genting, batu kerikil, gamping, gipsum, bahan galian, dll. Tarifnya dikenai yakni maksimum 25%.

g) Pajak Parkir

Yakni pengoperasian parkir di luar badan jalan. Penyediaan layanan parkir yang dapat digunakan sebagai kendaraan. Tarif yang dikenai maksimum 30%.

h) Pajak Air Tanah

yakni air yang berada pada di bawah permukaan ataupun formasi batuan. Tarif yang dikenai maksimum yakni 20%.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Diterapkan pada harga jual pajak tersebut, tarif yang dikenai maksimum yakni 10%.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak daerah termasuk pajak PBB, tidak seperti pajak pusat PBB. Pajak pusat PBB berlaku sebagai sektor



penghijauan, kehutanan dan pertambangan. PBB pajak daerah, di sisi lain, berada di desa dan kota.

k) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Rincian hak pada tanah yang termasuk didalam pajak tersebut meliputi kepemilikan, pemanfaatan, penggunaan, kepemilikan rumah susun, dan penguasaan. Tarif pajak maksimum untuk perolehan hak pada tanah dan konstruksi yakni 5%.

### **3. Pajak Kendaraan Bermotor**

a. **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu seluruh kendaraan roda dan trailernya digunakan di seluruh jenis jalan, serta ditenagai oleh peralatan teknik dalam bentuk mesin ataupun peralatan lain fungsinya membantu mengubah sumber energy yang diberikan menjadi mobilitas kendaraan bermotor yang bersangkutan, ini termasuk alat-alat besar yang menggunakan roda serta motor selama operasi tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang beroperasi di bawah laut.

b. **Objek pajak**

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor untuk semua kendaraan milik orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal berikut ini dikecualikan dari penjelasan Kendaraan Bermotor sebagai halnya dimaksud dalam ayat (2) :

- 1) Kereta api.
- 2) Kendaraan bermotor digunakan bagi keperluan pertahanan serta keamanan negara saja.
- 3) Pembebasan pajak pemerintah untuk kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan berdasarkan asas timbal balik.
- 4) Objek pajak lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku untuk orang pribadi, organisasi, instansi Pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Ini adalah hasil perkalian dari dua faktor utama, sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- 2) Berat mencerminkan kerusakan jalan relatif dan/atau pencemaran lingkungan yang disebabkan dari penggunaan Kendaraan Bermotor.

Berat kendaraan dinyatakan sebagai koefisien nilai yang lebih besar dari atau sama dengan 1, pada definisi sebagai berikut:

- a) Koefisien satu artinya bahwa kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan kendaraan tersebut di atas dianggap dapat diterima.
  - b) Jika koefisien lebih besar dari satu artinya penggunaan kendaraan dianggap di atas batas yang diizinkan.
- e. Tarif dan Tata Cara Perhitungan Kendaraan Bermotor
- Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan meliputi:
- 1) Tarif PKB pribadi atas kepemilikan kendaraan pertama paling rendah 1%, dengan maksimum 2% serta dengan kepemilikan kendaraan ke-2 serta seterusnya tarif bisa ditetapkan secara bertahap yakni 2% sampai dengan 10%.
  - 2) Tarif PKB angkutan umum, *ambulance*, pemadam kebakaran, *social* keagamaan, lembaga *social* serta keagamaan, pemerintahan/TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, serta kendaraan lainnya yang ditetapkan minimal yakni 10% dan maksimal yakni 1%.
  - 3) Tarif Pajak minimum untuk alat berat serta alat besar untuk kendaraan bermotor adalah 0,1% dan maksimum 0,2%.
- f. Perhitungan Pajak Kendaraan

Pokok pajak kendaraan yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Secara umum, cara menghitung pajak kendaraan yaitu sesuai pada rumus berikut:

Pajak kendaraan = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak biasanya ditentukan oleh pemerintah dalam suatu table yang diterbitkan setiap tahun.

*Sumber : mastersite, forum pajak Indonesia*

### **Gambar 3.1 Perhitungan Pajak Kendaraan**

Pajak kendaraan dihitung 1 tahun sekali. Dan pajak dipungut bersamaan dengan diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biasanya berupa stempel pajak pada STNK. Setelah jumlah pajak dihitung, pajak akan dibayarkan di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau lokasi tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah daerah setempat.

#### **g. Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

- 1) Pajak kendaraan dikenai selama pajak 12 bulan berturut-turut setelah pajak kendaraan didaftarkan.
- 2) Pajak kendaraan dibayarkan dimuka.
- 3) Dalam hal pajak kendaraan bermotor yang mengalami (*force majeure*), apabila jangka waktu penghitungan pajak kurang dari 12 bulan, jumlah pajak yang telah dibayar oleh pihak yang telah melewati masa pembayaran pajak dapat dikembalikan.
- 4) Ketentuan lain terkait tata cara ganti rugi diatur oleh peraturan gubernur.

5) Pendapatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak kendaraan, termasuk pajak yang dialokasikan untuk kabupaten/kota, akan dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal serta angkutan umum.

h. Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum dibayar harus dibayar ataupun dikembalikan sekaligus dimuka sebelum 12 bulan. PKB tersebut akan diganti dalam waktu 30 hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembetulan, putusan pemberatan serta putusan banding, yang akan menambah jumlah pembayaran pajak.

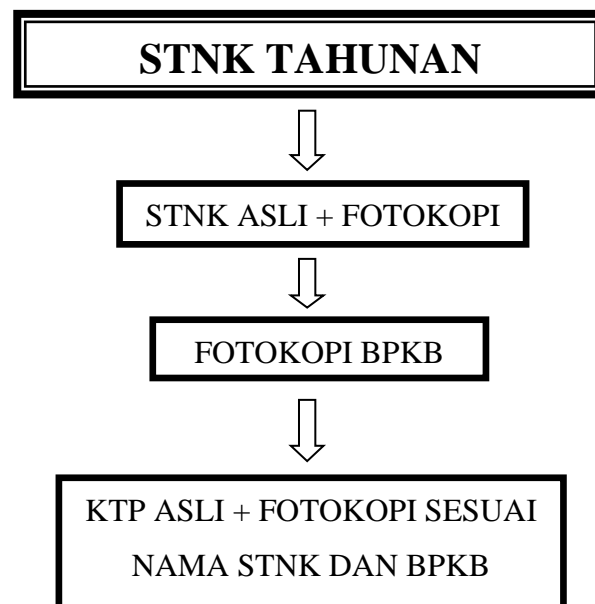
Pembayaran pajak kendaraan dilakukan ke kas daerah, bank, ataupun lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur. Wajib Pajak pada saat membayar pajaknya akan mendapatkan surat keterangan pajak atau slip pembayaran pajak.

Adapun prosedur persyaratan pembayaran pajak kendaraan yaitu meliputi:

- 1) Wajib Pajak melengkapi formulir permohonan perpanjangan STNK berdasarkan data STNK dan BPKB, Wajib Pajak bisa mendapatkan formulir ini di meja pendaftaran. dan melengkapi formulir yang dilampirkan pada dokumen yang diperlukan.

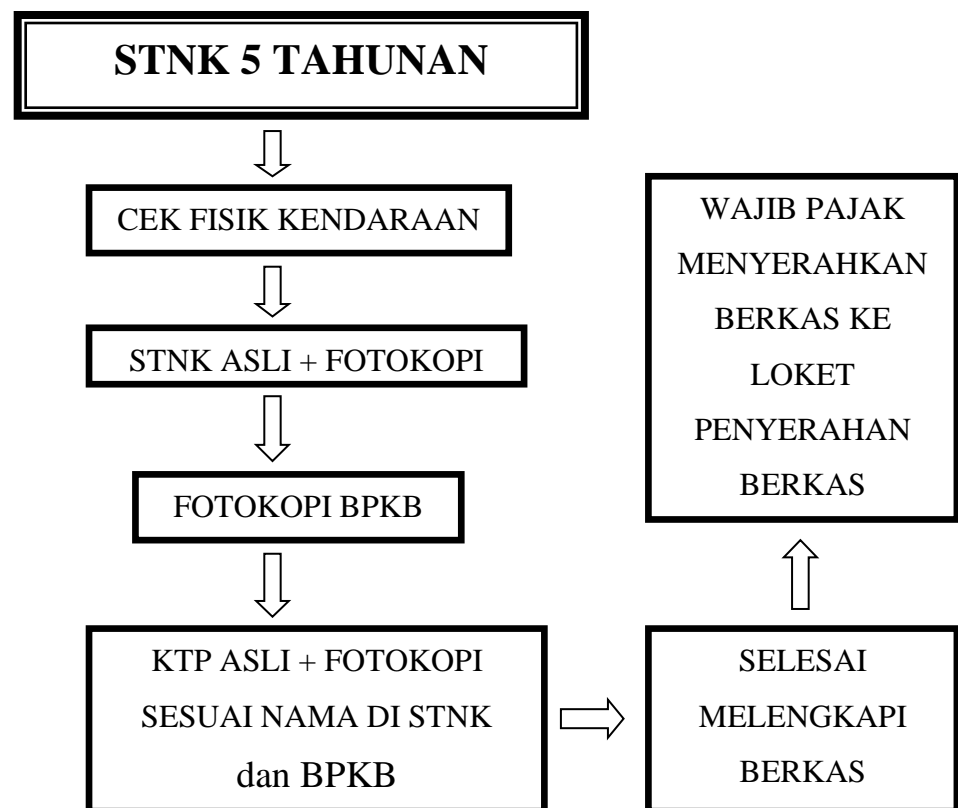
- 2) Wajib Pajak menunggu namanya yang akan dipanggil berdasarkan data yang diberikan pada STNK.
- 3) Wajib Pajak akan menerima tanda terima pajak dengan pajak yang harus dibayarkan.
- 4) Wajib Pajak memberikan kepada kasir tanda terima pembayaran dan uang yang sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
- 5) Setelah membayar pajak, Wajib Pajak akan menerima tanda terima pajak serta menyerahkan bukti ke loket pengambilan STNK.
- 6) Wajib Pajak menunggu namanya yang akan dipanggil serta STNK baru sudah diperpanjang untuk 1 tahun ke depan.

File Yang Dilampirkan Dalam Perpanjangan Pajak



Sumber : SAMSAT Kota Tegal

**Gambar 3.2 File yang dilampirkan dalam perpanjangan pajak**



Sumber : SAMSAT Kota Tegal

**Gambar 3.3 File yang dilampirkan dalam perpanjangan pajak**

i. Penyelesaian Tunggal Pajak

Penyelesaian tunggakan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara, yaitu meliputi :

1) Tertib Administrasi

Wajib menyelenggarakan perekaman data dan penyimpanan berkas terkait penyelesaian tunggakan pajak mencakup: pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, data Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan daftar harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

## 2) Menetapkan Umur Tunggakan Pajak

Penetapan umur tunggakan pajak setiap tahun diterbitkannya pajak yang mendasari tunggakan pajak serta tahun dikeluarkannya putusan gugatan atau banding yang meningkatkan jumlah tunggakan pajak dan menentukan penilaian kualitas tunggakan pajak.

## 3) Membuat Anggaran Untuk Pembayaran Biaya Penagihan Pajak

Biaya penagihan pajak meliputi biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, 1% dari pokok lelang ataupun dari hasil penjualan sebagai halnya telah diatur pada Pasal 28 ayat (1a) serta Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan surat paksa, biaya lain terkait atas penagihan Pajak dilakukan dibuatkan rencana *budget* anggarannya.

## 4) Kegiatan Pembayaran Atas Penagihan Pajak Yang Dilakukan Oleh Fiskus

Wajib Pajak melakukan analisis (pembedahan) pajak tunggakan dan membayar biaya tunggakan pajak bulanan untuk melunasi penyelesaian tunggakan pajaknya.

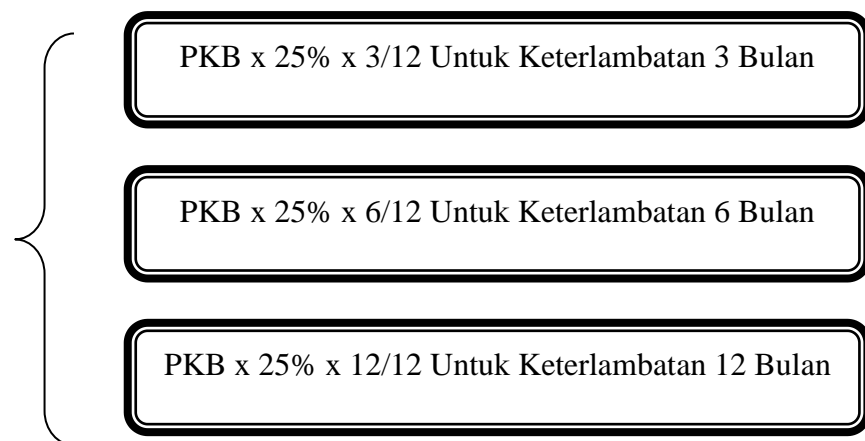
Jika tidak dibayarkan, Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah lebih lanjut untuk menanganinya.

Oleh karena itu, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran dengan baik dan tepat waktu, untuk mengurangi denda dan pajak



yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



*Sumber : SAMSAT Kota Tegal*

**Gambar 3.4 Perhitungan Denda PKB**

k. Bagaimana timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor ?

Timbulnya tunggakan PKB disebabkan karena lokasi perpajakan, informasi perpajakan yang tidak lengkap, kesadaran masyarakat yang rendah, dan sanksi administrasi. Wajib Pajak yang berutang kendaraan bermotor karena tingkat pendapatan dan pekerjaannya, serta layanan yang diberikan mengenai lokasi pembayaran dan informasi pajak. Dan tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan.

Menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak adalah :

### 1) Kesadaran

Kesadaran dalam membayar pajak yang tinggi berarti moralitas membayar pajak juga tinggi, maka kesadaran membayar pajak merupakan bagian dari kewarganegaraan.

### 2) Pendapatan

Ada 2 prinsip berbeda dari aturan pendapatan, yang menyatakan bahwa tidak hanya pendapatan yang lebih tinggi yang harus membayarkan lebih banyak, namun kenyataannya jika pendapatan mereka juga lebih rendah harus membayarkan pajaknya yang sama.

### 3) Kelalaian

Kelalaian yaitu salah satu tindakan penolakan untuk membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan serta penolakan untuk menyelesaikan prosedur yang dipersyaratkan oleh wajib pajak, yang bisa mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak.

### 4) Pelayanan

Pemerintahan melayani pada warga negaranya secara individu dan kolektif, dan warga negara memberikan hasil dalam bentuk uang berupa pajak yang dibayarkan pada pemerintahan.

Fakta bahwa pemerintah menyumbang kepada warga negara yang merasakan manfaat besar akan menimbulkan rasa kesadaran yang sangat tinggi di negara tersebut.

Pada saat pemerintahan kurang memperhatikan dalam melayani warganya dengan baik, maka masyarakat juga akan kurang sadar dalam memberikan kontraprestasi terhadap negara berupa pajak.

#### 5) Pendidikan

Diasumsikan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pajak yang harus dibayar, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peranannya didalam menentukan perilaku dan sikapnya..

### **B. Praktek**

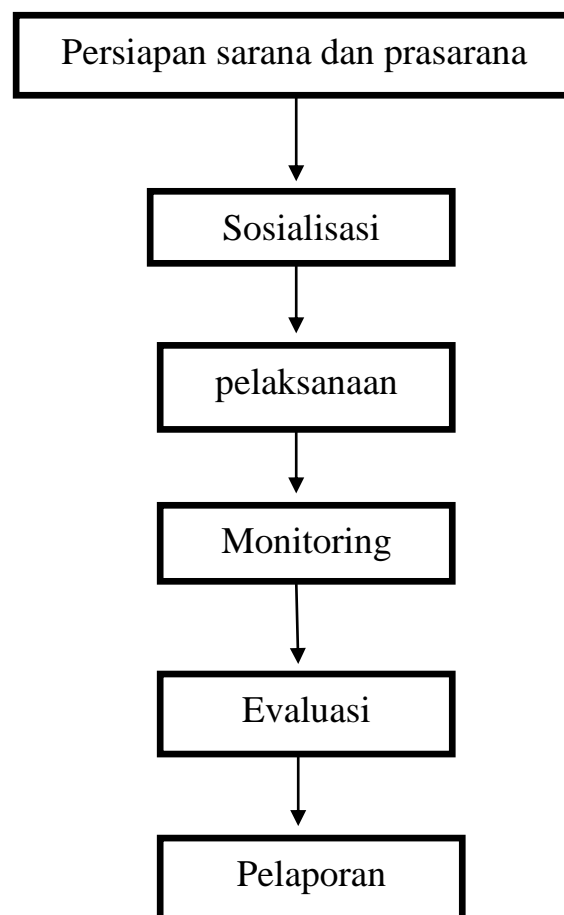
Di Indonesia saat ini sejumlah provinsi memberlakukan kebijakan pembebasan denda atau lebih dikenal dengan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak kendaraan bermotor bisa memanfaatkannya untuk mengurangi beban denda keterlambatan dari tunggakan pajak.

Denda pajak kendaraan bermotor yaitu denda yang wajib dibayarkan pemilik kendaraan dengan keterlambatan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun mobil. Dan jangka waktunya telah ditentukan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ada yang terlambat beberapa hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun.

1) Tata Cara Pemberian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 44 Tahun 2020 Tentang “Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah” Pada BAB II “Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor” Bagian Keempat Pasal 6 Berbunyi :

a. Pelaksanaan Keringanan Pajak PKB dilaksanakan dengan tahapan :



*Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 44 Tahun 2020*

**Gambar 3.5 Pelaksanaan Keringanan PKB**

Keterangan :

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
  - 2) Mensosialisasikan kepada wajib pajak tentang pelaksanaan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.
  - 3) Pelaksanaan dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor
  - 4) Monitoring terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan untuk wajib pajak yang membayarkan pajaknya.
  - 5) Evaluasi terhadap wajib pajak untuk menilai apakah wajib pajak sudah memahaminya dengan baik atau tidak.
  - 6) Pelaporan dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Teknis pelaksanaan dan tata cara Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang dimaksud di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- Keriganan Pajak Kendaraan Bermotor dapat diberikan pada Wajib Pajak yang mengajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Angkutan umum orang dan barang
  - 2) Mengalami keterlambatan pembayaran terhitung sampai dengan 30 September 2021
  - 3) Pemberian keringanan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

**Tabel 3.2 Pemberian Keringan Pajak Kendaraan Bermotor**

Unit kendaraan yang dimiliki	Keringanan
5 unit	10%
6-10 unit	12%
11-20 unit	14%
21-50 unit	16%
51-100 unit	18%
Lebih dari 100 unit	20%

*Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 44 Tahun 2020*

2) Prosedur Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa

Sebelum Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor :

- a) Membuat surat permohonan pengurangan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditujukan kepada kepala UPPD SAMSAT Kota Tegal.
- b) Melengkapi berkas permohonan diantaranya adalah surat permohonan pengurangan denda pajak, kartu identitas diri (KTP), fotokopi STNK, SKKP pajak, surat pendukung (yang masuk dalam kriteria kendaraan yang dapat diberikan pengurangan denda pajak).
- c) Lampirkan bukti fisik (foto kendaraan tersebut).
- d) Serahkan berkas ke UPPD SAMSAT Kota Tegal.
- e) 14 hari terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) pengurangan PKB harus dibayar. Apabila tidak di penuhi SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

3) Contoh Perhitungan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Pada Tahun 2015, PKB Yamaha Motor adalah Rp.48.250 serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) adalah Rp.8.400

**Tabel 3.3 Jumlah yang wajib dibayarkan (Rupiah)**

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN-KB
48.250	0	48.250	PKB
8.400	0	8.400	SWDKLLJ
100.000	0	100.000	BIAYA ADM. STNK
60.000	0	60.000	BIAYA ADM. TNKB
216.650	0	216.650	JUMLAH

*Sumber : SAMSAT Kota Tegal*

1) Denda PKB Telat 3 Bulan

- a) Total Pajak Pokok yang wajib dibayarkan Rp56.650
- b) Tetapi telat membayar PKB, sehingga dikenai 25% denda per tahun
- c) Rumus Denda PKB

$$\text{Telat 3 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 3/12$$

$$\text{Telat 6 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 6/12$$

$$\text{Telat 1 tahun} = \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$$

d) PKB Denda 3 bulan =  $\text{Rp}48.250 \times 25\% \times 3/12 = \text{Rp}3.015,63$

e) Denda SWDKLLJ pada roda dua =  $\text{Rp}32.000$ ,

Denda SWDKLLJ untuk mobil =  $\text{Rp}100.000$

f) Total Denda PKB =  $\text{Rp}3.015,63 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}35.015,63$

g) Total Jenderal Biaya Pajak Motor dan denda yang wajib dibayarkan = Biaya PKB + SWDKLLJ + Denda Keseluruhan =  
 $\text{Rp}48.250 + \text{Rp}8.400 + \text{Rp}35.015,63 = \text{Rp}91.665,63$

## 2) Denda PKB Telat 6 Bulan

a) Total Pajak Pokok yang wajib dibayarkan  $\text{Rp}56.650$

b) Tetapi telat membayar PKB, sehingga dikenai 25% denda per tahun

c) Rumus Denda PKB

Telat 3 bulan =  $\text{PKB} \times 25\% \times 3/12$

Telat 6 bulan =  $\text{PKB} \times 25\% \times 6/12$

Telat 1 tahun =  $\text{PKB} \times 25\% \times 12/12$

d) PKB Denda 6 bulan =  $\text{Rp}48.250 \times 25\% \times 6/12 = \text{Rp}6.031,25$

e) Denda SWDKLLJ pada roda dua =  $\text{Rp}32.000$

Denda SWDKLLJ untuk mobil =  $\text{Rp}100.000$

f) Total Denda PKB =  $\text{Rp}6.031,25 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}38.031,25$

g) Total Jenderal Biaya Pajak Motor dan denda yang wajib dibayarkan = Biaya PKB + SWDKLLJ + Denda Keseluruhan =  
 $\text{Rp}48.250 + \text{Rp}8.400 + \text{Rp}38.031,25 = \text{Rp}94.681,25$



### 3) Denda PKB Telat 12 Bulan

- a) Total Pajak Pokok yang wajib dibayarkan Rp56.650
- b) Tetapi telat membayar PKB, sehingga dikenai 25% denda per tahun

#### c) Rumus Denda PKB

$$\text{Telat 3 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 3/12$$

$$\text{Telat 6 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 6/12$$

$$\text{Telat 1 tahun} = \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$$

$$\text{d) PKB Denda 12 bulan} = \text{Rp}48.250 \times 25\% \times 12/12 = \text{Rp}12.062,5$$

$$\text{e) Denda SWDKLLJ pada roda dua} = \text{Rp}32.000$$

$$\text{Denda SWDKLLJ untuk mobil} = \text{Rp}100.000$$

$$\text{f) Total Denda PKB} = \text{Rp}12.062,5 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}44.062,5$$

$$\begin{aligned} \text{g) Total Jenderal Biaya Pajak Motor dan denda yang wajib} \\ \text{dibayarkan} &= \text{Biaya PKB} + \text{SWDKLLJ} + \text{Denda Keseluruhan} = \\ &\text{Rp}48.250 + \text{Rp}8.400 + \text{Rp}44.062,5 = \text{Rp}100.712,5 \end{aligned}$$

- b. Pada Tahun 2019, PKB Honda Motor adalah Rp.265.500 dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) adalah Rp.35.000

**Tabel 3.4 Jumlah yang wajib dibayarkan (Rupiah)**

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN-KB
265.000	0	265.000	PKB
35.000	0	35.000	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM. STNK
0	0	0	BIAYA ADM. TNKB
300.500	0	300.500	JUMLAH

*Sumber : SAMSAT Kota Tegal*

1) Denda PKB Telat 3 Bulan

- a) Total Pajak Pokok yang wajib dibayarkan Rp300.500
- b) Tetapi telat membayar PKB, sehingga dikenai 25% denda per tahun
- c) Rumus Denda PKB
 
$$\text{Telat 3 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 3/12$$

$$\text{Telat 6 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 6/12$$

$$\text{Telat 1 tahun} = \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$$
- d) PKB Denda 3 bulan =  $\text{Rp}265.500 \times 25\% \times 3/12 = \text{Rp}16.593,75$
- e) Denda SWDKLLJ pada roda dua = Rp32.000

Denda SWDKLLJ untuk mobil =Rp100.000

f) Total Denda PKB =  $\text{Rp}16.593,75 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}48.593,75$

g) Total Jenderal Biaya Pajak Motor dan denda yang wajib dibayarkan = Biaya PKB + SWDKLLJ + Denda Keseluruhan  
 $= \text{Rp}265.500 + \text{Rp}35.000 + \text{Rp}48.593,75 = \text{Rp}349.093,75$

## 2) Denda PKB Telat 6 Bulan

a) Total Pajak Pokok yang wajib dibayarkan  $\text{Rp}300.500$

b) Tetapi telat membayar PKB, sehingga dikenai 25% denda per tahun

c) Rumus Denda PKB

$$\text{Telat 3 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 3/12$$

$$\text{Telat 6 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 6/12$$

$$\text{Telat 1 tahun} = \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$$

d) Denda PKB 6 bulan =  $\text{Rp}265.500 \times 25\% \times 6/12 = \text{Rp}33.187,5$

e) Denda SWDKLLJ pada roda dua =  $\text{Rp}32.000$

Denda SWDKLLJ untuk mobil =Rp100.000

f) Total Denda PKB =  $\text{Rp}33.187,5 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}65.187,5$

g) Total Jenderal Biaya Pajak Motor dan denda yang wajib dibayarkan = Biaya PKB + SWDKLLJ + Denda Keseluruhan  
 $= \text{Rp}265.500 + \text{Rp}35.000 + \text{Rp}65.187,5 = \text{Rp}365.687,5$

## 3) Denda PKB Telat 12 Bulan

a) Total Pajak Pokok yang wajib dibayarkan  $\text{Rp}300.500$

b) Tetapi telat membayar PKB, sehingga dikenai denda 25% per tahun

c) Rumus Denda PKB

$$\text{Telat 3 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 3/12$$

$$\text{Telat 6 bulan} = \text{PKB} \times 25\% \times 6/12$$

$$\text{Telat 1 tahun} = \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$$

d) PKB Denda 12 bulan =  $\text{Rp}265.500 \times 25\% \times 12/12 = \text{Rp}66.375$

e) Denda SWDKLLJ pada roda dua =  $\text{Rp}32.000$

$$\text{Denda SWDKLLJ untuk mobil} = \text{Rp}100.000$$

f) Total Denda PKB =  $\text{Rp}66.375 + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}98.375$

g) Total Jenderal Biaya Pajak Motor dan denda yang wajib dibayarkan = Biaya PKB + SWDKLLJ + Denda Keseluruhan  
 $= \text{Rp}265.500 + \text{Rp}35.000 + \text{Rp}98.375 = \text{Rp}398.875$

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya yang penulis uraikan diatas maka penulis disini dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Tegal disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian pembebasan kendaraan bermotor dengan beberapa tahapan diantaranya adalah dengan persiapan sarana dan prasarana, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan pemberian keringanan pembebasan denda PKB sesuai dengan ketentuan unit kendaraan motor yang dimiliki.
2. Timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor kesadaran membayar pajak yang tinggi berarti moralitas membayar pajak juga tinggi, faktor pendapatan yaitu pendapatan yang lebih tinggi maupun pendapatan yang lebih rendah harus dikenakan pajak yang sama, faktor kelalaian yaitu salah satu tindakan penolakan membayarkan pajaknya yang sudah diatur oleh pemerintahan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak, faktor pelayanan yaitu pemerintah melayani bagi warga negaranya secara individu maupun secara kolektif, faktor pendidikan yaitu diasumsikan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi peran penentu sikap perilaku

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka berikut ini penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak instansi pemerintahan serta pihak yang terkait yaitu :

1. Kantor SAMSAT seharusnya harus lebih tegas dalam menangani penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan memberikan surat penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang sudah lama menunggak.
2. Mensosialisasikan melalui majalah cetak dan elektronik pada masyarakat tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) supaya Masyarakat Indonesia semakin mengerti serta memahami pentingnya membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda Jabar, (2021) pajak kendaraan bermotor (Online)  
<https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/> (15 Januari 2021)
- Bohari, H, (2010) *Pengantar hukum pajak, Ed.Revisi Tahun 2010*. Jakarta: Rajawali Pers (15 Januari 2021)
- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana
- Kemenkeu, 2018. Pajak Daerah (online) [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) (5 Maret 2021)
- Klik Pajak, (2021) jenis pajak daerah beserta tarifnya (online)  
<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/> (3 Maret 2021)
- Layanan informasi prosedur pengurangan denda pajak kendaraan bermotor (online) [https://jambiprov.go.id/files/prosedur\\_pengurangan\\_pajak.pdf](https://jambiprov.go.id/files/prosedur_pengurangan_pajak.pdf) (26 juli 2021)
- Mardiasmo, (2018) Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi
- Mastersite, 2016. pajak kendaraan bermotor (Online)  
<https://Forumpajak.Org/Pajak-Kendaraan-Bermotor/> (15 Januari 2021)
- Sri Rahayu Syah. 2018. *‘Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar.’* Jurnal Administrasi: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 5, No. 1, Hal 38-39
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administrative Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

# LAMPIRAN



## 1. SURAT PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelola  
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 973/02.649 Tahun 2020  
Tanggal : 17 Februari 2020

TEGAL 21-02-2020

Kepada Yth. :  
Bapak Gubernur Jawa Tengah  
Cc. Kepala Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di-  
TEMPAT

Perihal : Permohonan Pembebasan BBN II

Dengan hormat,  
Mendasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020  
tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi  
Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan  
Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, bersama ini saya :

Nama : NURSIDIK RISA FAJAR  
Alamat : J. FLORES T. Nomor 5 TEGAL RT 08 / IX KEL. PANGGUNING  
NIK : 3976020304000001

mengajukan permohonan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II  
Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan  
Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan  
bermotor yang akan kami daftarkan di SAMSAT Kabupaten/Kota  
....., dengan identitas sebagai berikut :

Nama : AMIR MUHAMMAD  
Alamat : TEGALAN RT 05/02 ADIWIJAYA KAB. TEGAL  
Nopol Lama : G 5098 Q  
Merk/type : YAMAHA / 2TP  
Jenis/Model : SPM / SOLA  
Tahun/Silinder : 2015 / 150 cc  
Nomor Rangka : MN3P.G1810FF158195  
Nomor Mesin : G367E0160831  
Asal Kendaraan : KAB. TEGAL  
No Fiskal : .....  
Tanggal Fiskal : .....  
Tanggal Kultansi : .....

Demikian permohonan ini saya sampaikan.

Pemohon  
NURSIDIK R. FAJAR  
Nama jelas dan tanda tangan

*Permohonan Sanksi Denda*



## 3. SURAT TAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

MRT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
UPPD TEGAL  
Alamat : Jl. Kapt. Sudibyo No. 152 Tegal

SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
No. 25.0000001.1/III/2020

Nomor Polisi	: G2148FN	Tgl. Jatuh Tempo	: 21-11-2019
Nama Pemilik	: SUBANDI	Jumlah PKB Pokok	: 549,000
Alamat Pemilik	: JL TAWES II NO 21 RT 07/04 KEL TEGAL	Jumlah Denda PKB	: 43,920
Desa/Kelurahan	: ALSARI TEGAL	Jumlah SWDKLLJ Pokok	: 35,000
Kecamatan	: TEGAL BARAT	Jumlah Denda SWDKLLJ	: 16,000
Merek / Model	: YAMAHA RG 10	PNBP STNK	: 100,000
Type	: YAMAHA RG 10	PNBP TNKB	: 60,000
Tahun Buat / CC	: 2014	Jumlah Pembayaran	: 803,920
Plat Dasar	: HITAM		
Warna Kendaraan	: HITAM		

Keterangan :  
1. Jumlah tersebut di atas adalah kondisi saat SPKPPKB di cetak,  
2. Abaikan Surat ini jika sudah dilakukan pembayaran.

TEGAL, 04-03-2020  
KEPALA UPPD TEGAL

Ir. TUHU SULISTYO, MSi  
NIP. 1962070219890310

TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

No. 25.0000001/III/2020

Nomor Polisi	: G2148FN	STATUS KENDARAAN
Nama Pemilik	: SUBANDI	1. Dimiliki, sanggup byr tgl ...
Alamat Pemilik	: JL TAWES II NO 21 RT 07/04 KEL	2. Dijual
No. Telp Rumah/HP/Kantor	: 803,920	3. Rusak Berat
Jumlah Pembayaran	: 21-11-2019	4. Hilang
Tanggal Penerbitan		5. Meninggal dunia tanpa ahli waris
		6. Menutup usaha / pailit
		7. Dicaput registrasinya
		8. Tdk diket kedudukan / alamat karen
		beralih kepemilikan dan/atau sebab
		PETUGAS

WAJIB PAJAK / KUASA

SUBANDI

Catatan : 087029 7777 OK  
Motor yang di maksud.

Dicetak oleh TP - KPPKB Kota Tegal 04-03-2020 13:28:03

Surat Tagihan Pajak

4. NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 JENIS SEPEDA  
MOTOR RODA DUA





5. NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 JENIS SEPEDA  
MOTOR RODA DUA



6. NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 JENIS SEPEDA  
MOTOR RODA DUA

NO	KODING	MERK	TYPE	TH BIK	NAHB 2019	NUMOT	DP PNB	PNB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	701042 00130	ADIVA	AD 200	2011	52.100.000	1,0	52.100.000	781.500
2	701042 00230	ADIVA	AR 200	2011	49.700.000	1,0	49.700.000	745.500
3	701005 00130	AGUSTA	AGUSTA	1985	9.000.000	1,0	9.000.000	135.000
4	701010 00130	ALPINO	80cc	1985	9.000.000	1,0	9.000.000	135.000
5	701013 00125	APP KTM	100-AX	2002	2.500.000	1,0	2.500.000	34.500
6				2003	2.400.000	1,0	2.400.000	35.000
7				2004	2.500.000	1,0	2.500.000	37.500
8				2005	2.700.000	1,0	2.700.000	40.500
9				2006	2.800.000	1,0	2.800.000	42.000
10				2007	2.900.000	1,0	2.900.000	43.500
11	701013 00125	APP KTM	100-AX	2008	3.100.000	1,0	3.100.000	46.500
12				2009	3.200.000	1,0	3.200.000	48.000
13				2010	3.400.000	1,0	3.400.000	51.000
14				2011	3.600.000	1,0	3.600.000	54.000
15				2012	3.700.000	1,0	3.700.000	55.500
16				2013	3.900.000	1,0	3.900.000	58.500
17				2014	4.100.000	1,0	4.100.000	61.500
18				2015	4.300.000	1,0	4.300.000	64.500
19	701013 00225	APP KTM	100-ST	2002	2.300.000	1,0	2.300.000	34.500
20				2003	2.400.000	1,0	2.400.000	36.000
21				2004	2.500.000	1,0	2.500.000	37.500
22				2005	2.700.000	1,0	2.700.000	40.500
23				2006	2.800.000	1,0	2.800.000	42.000
24				2007	2.900.000	1,0	2.900.000	43.500
25				2008	3.100.000	1,0	3.100.000	46.500
26	701013 00225	APP KTM	100-ST	2009	3.200.000	1,0	3.200.000	48.000
27				2010	3.400.000	1,0	3.400.000	51.000
28				2011	3.600.000	1,0	3.600.000	54.000
29				2012	3.700.000	1,0	3.700.000	55.500
30				2013	4.900.000	1,0	4.900.000	73.500
31				2014	6.200.000	1,0	6.200.000	93.000
32				2015	6.700.000	1,0	6.700.000	100.500
33	701013 02825	APP KTM	TM 110-18	2000	2.300.000	1,0	2.300.000	34.500
34				2001	2.300.000	1,0	2.300.000	34.500
35				2002	2.400.000	1,0	2.400.000	36.000
36				2003	2.500.000	1,0	2.500.000	37.500
37				2004	2.600.000	1,0	2.600.000	39.000
38				2005	2.800.000	1,0	2.800.000	42.000
39				2006	2.900.000	1,0	2.900.000	43.500
40				2007	2.900.000	1,0	2.900.000	43.500
41	701013 02825	APP KTM	TM 110-18	2008	3.200.000	1,0	3.200.000	48.000
42				2009	3.300.000	1,0	3.300.000	49.500
43				2010	3.500.000	1,0	3.500.000	52.500
44				2011	3.700.000	1,0	3.700.000	55.500
45				2012	3.800.000	1,0	3.800.000	57.000
46				2013	6.500.000	1,0	6.500.000	97.500
47				2014	6.600.000	1,0	6.600.000	99.000
48				2015	7.100.000	1,0	7.100.000	105.500
49	701013 00325	APP KTM	TM 125	2002	2.200.000	1,0	2.200.000	33.000
50				2003	2.300.000	1,0	2.300.000	34.500
51				2004	2.400.000	1,0	2.400.000	36.000
52	701013 00425	APP KTM	TM 125 Y-3	2002	2.200.000	1,0	2.200.000	33.000
53				2003	2.300.000	1,0	2.300.000	34.500
54				2004	2.400.000	1,0	2.400.000	36.000
55	701013 03025	APP KTM	TM 125 SC A/T	2011	5.600.000	1,0	5.600.000	84.000
56				2012	5.700.000	1,0	5.700.000	85.500
57				2013	5.800.000	1,0	5.800.000	87.000
58				2014	5.900.000	1,0	5.900.000	88.500

7. NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 JENIS SEPEDA  
MOTOR RODA DUA

NO	KODE	SPESIFIKASI	MODEL	Tahun	Nilai Jual	Nilai Sewa	Nilai Resale
90	701013 00525	APP KTM	TM100	2004	2.500.000	1,0	2.500.000
91				2005	2.700.000	1,0	2.700.000
92				2006	2.800.000	1,0	2.800.000
93				2007	2.900.000	1,0	2.900.000
94				2008	3.100.000	1,0	3.100.000
95				2009	3.200.000	1,0	3.200.000
96	701013 00525	APP KTM	TM100	2010	3.400.000	1,0	3.400.000
97				2011	3.600.000	1,0	3.600.000
98				2012	3.700.000	1,0	3.700.000
99				2013	4.800.000	1,0	4.800.000
100				2014	6.100.000	1,0	6.100.000
101	701013 00525	APP KTM	TM100	2015	6.600.000	1,0	6.600.000
102	701013 00725	APP KTM	TM100-11/18	2002	1.900.000	1,0	1.900.000
103				2003	2.000.000	1,0	2.000.000
104				2004	2.100.000	1,0	2.100.000
105				2005	2.300.000	1,0	2.300.000
106				2006	2.400.000	1,0	2.400.000
107				2007	2.500.000	1,0	2.500.000
108	701013 00725	APP KTM	TM100-11/18	2008	2.800.000	1,0	2.800.000
109				2009	2.900.000	1,0	2.900.000
110				2010	3.000.000	1,0	3.000.000
111				2011	3.200.000	1,0	3.200.000
112				2012	3.300.000	1,0	3.300.000
113				2013	3.400.000	1,0	3.400.000
114				2014	4.000.000	1,0	4.000.000
115	701013 00725	APP KTM	TM100-11/18	2015	4.200.000	1,0	4.200.000
116		APP KTM	TM100-18	2016	4.300.000	1,0	4.300.000
117				2017	4.400.000	1,0	4.400.000
118				2018	4.500.000	1,0	4.500.000
119	701013 00825	APP KTM	TM100-3/TM100-3S	2001	2.300.000	1,0	2.300.000
120				2002	2.400.000	1,0	2.400.000
121				2003	2.500.000	1,0	2.500.000
122				2004	2.600.000	1,0	2.600.000
123				2005	2.800.000	1,0	2.800.000
124				2006	2.900.000	1,0	2.900.000
125				2007	2.900.000	1,0	2.900.000
126	701013 00825	APP KTM	TM100-3/TM100-3S	2008	3.200.000	1,0	3.200.000
127				2009	3.300.000	1,0	3.300.000
128				2010	3.500.000	1,0	3.500.000
129				2011	3.700.000	1,0	3.700.000
130				2012	3.800.000	1,0	3.800.000
131				2013	4.700.000	1,0	4.700.000
132				2014	4.900.000	1,0	4.900.000
133				2015	5.200.000	1,0	5.200.000
134	701013 00825	APP KTM	TM100-3/TM100-3S	2016	5.300.000	1,0	5.300.000
135		APP KTM	TM100-3	2017	5.400.000	1,0	5.400.000
136				2018	5.500.000	1,0	5.500.000
137				2000	2.300.000	1,0	2.300.000
138	701013 01025	APP KTM	TM100-4/ TM100-4X	2001	2.300.000	1,0	2.300.000
139				2002	2.400.000	1,0	2.400.000
140				2003	2.500.000	1,0	2.500.000
141				2004	2.600.000	1,0	2.600.000
142				2005	2.800.000	1,0	2.800.000
143				2006	2.900.000	1,0	2.900.000
144				2007	2.900.000	1,0	2.900.000
145				2008	3.300.000	1,0	3.300.000
146	701013 01025	APP KTM	TM100-4/ TM100-4X	2009	3.600.000	1,0	3.600.000
147				2010	3.900.000	1,0	3.900.000
148							